



Jangan Hanya Setor Pajak Kamar

■ **KPK Endus Tunggakan Pajak Hotel**

■ **Pasang 1.000 Alat Monitoring Online**

Kalau tidak sama yang disetor dan dipungut, itu bisa pidana. Lalu jangan sekali-kali Bapak Ibu ngasih sesuatu ke ASN, itu namanya gratifikasi. Karena yang ngasih kena, yang nerima kena.

YOGYA. TRIBUN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya tunggakan pajak dari hotel yang ada di Kota Yogyakarta.

Koordinator Wilayah Korsub Pencegahan KPK, Adinsyah M Nasution mengatakan, dari pajak daerah, salah satu tunggakan terbesar berasal dari hotel yang tidak menyetorkan seluruh perolehan pungutan dari wajib pajak ke Pemerintah Kota Yogyakarta.

"Jangan gunakan tax (pajak) untuk usaha. Pak Wali (Wali Kota Haryadi Suyuti), kalau perlu tutup (hotelnnya)," tegas Adinsyah M Nasution dalam Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Daerah di Kota Yogyakarta tentang Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah melalui Program Monitoring Secara Online, di Ruang Bima Balakota, Pemkot Yogyakarta, Rabu (7/8). Coki, sapaan akrabnya,

menambahkan bahwa sebenarnya hotel itu memiliki delapan item penerimaan pajak. Namun selama ini, Coki mendengar informasi mayoritas hotel hanya menyetor pajak dari kamar hotel saja.

"Selain kamar, mereka itu ada juga laundry, hiburan, parkir, spa, ballroom, catering. Saya dengar yang dilaporkan hanya kamar saja. Lainnya belum. Perlu diawasi," ucapnya.

Hal tersebut yang membuat pihaknya lantas merencanakan pemasangan alat monitoring pajak online atau tap-

Alat Monitoring Pajak Online

- KPK mendengar adanya tunggakan setoran pajak hotel
- KPK mengingatkan agar hotel tidak hanya membayar kamar, tapi juga pajak atas jasa lain yang dijual
- Selain kamar, ada laundry, hiburan, parkir, spa, ballroom, catering dll
- Kini hotel dan restoran dipasang alat monitoring pajak online
- ASN juga akan melakukan pengawasan langsung

● ke halaman 15

GRAFFIS/PALUGZA RAHIMAN

Instansi	Nilai Be
1.	<input type="checkbox"/> Negatif
2.	<input type="checkbox"/> Positif
3.	<input type="checkbox"/> Netral
4.	
5.	

- BPKAD

- Inspektorat

- Bag. P3ADK

Jangan Hanya Setor Pajak

● Sambungan Hal 9

ping box sejumlah sebanyak 1.000 unit. Alat tersebut telah disiapkan oleh BPD DIY dan akan dipasang dalam beberapa tahap.

"Mulai bulan depan kami pasang alat semua resto dan hotel. Dan jangan dihambat," tegasnya.

Ia mengatakan, dengan menggunakan alat tersebut, penerimaan pajak dapat tercatat dengan baik. Pihaknya pun meminta agar ada tim uji publik.

"Saya minta seluruh jasa resto dihitung selama 2 minggu. Agar kita tahu batas bawah dan atas potensi penjualan di resto. Libatkan kecamatan. Petugasnya ti-

dak boleh kasih makan, minum, apalagi yang lain, sehingga nanti tahu berapa riil transaksi dari restoran," bebarnya.

Coki mengingatkan, pelaku usaha di Yogyakarta hanya sebagai wakil yang dititipi pajak oleh konsumen. Maka wajib hukumnya untuk memberikan setoran sesuai dengan yang dipungut.

"Kalau tidak sama yang disetor dan dipungut, itu bisa pidana. Lalu jangan sekali-kali Bapak Ibu ngasih sesuatu ke ASN, itu namanya gratifikasi. Karena yang ngasih kena, yang nerima kena," tegasnya.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini merupakan tindak lanjut MoU yang sudah dilakukan anta-

ra Pemda DIY dan BPD DIY dalam rangka optimalisasi pendapatan.

"Untuk mencapai pendapatan yang optimal diperlukan sistem yang dinamakan monitoring secara online. Kami akan bersungguh-sungguh meningkatkan partisipasi wajib pajak," ujarnya.

Program tersebut, lanjutnya, selain untuk monitoring juga bisa dimonitor, baik oleh wajib pajak maupun KPK. Kegiatan tersebut harus didukung para pelaku usaha untuk menjaga akuntabilitas para wajib pajak, dalam hal ini masyarakat.

"Pajak ini digunakan untuk membangun jalan yang baik, lampu, keamanan tempat Bapak Ibu berusaha. Ini tugas pemerintah. Tidak hanya melayani, tapi me-

lindungi usaha Bapak Ibu," bebarnya.

Namun, Haryadi menambahkan bahwa Pemkot Yogyakarta masih memiliki piutang terutama dari beberapa objek pajak. Ia mengatakan bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan wajib pajak tapi belum disetorkan kepada pemerintah.

"Contoh perusahaan hotel dan restoran yang menunggak pajak dan belum menyetorkan ke pemerintah. Hal ini perlu kami monitor agar tidak terjadi keterlambatan. Jangan sampai kewajiban menjadi hak. Dengan adanya monitoring online, ke depan tidak ada lagi yang masih disimpan oleh Bapak Ibu sekalian terkait apa yang sudah disampaikan wajib pajak," pungkas Haryadi. (kur)

Kapolresta Terkejut

KAPOLRESTA Yogyakarta, Kombes Pol Armaini mengaku terkejut mendengar paparan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai banyaknya hotel yang menunggak pajak ke Pemkot Yogyakarta.

Ia pun membagikan pengalamannya selama kurang lebih 1,5 tahun bertugas di Kota Yogyakarta, telah memesan kamar hotel untuk keperluannya.

Seluruh kamar dibayar menggunakan kocek pribadinya. Ia pun menyesalkan terkait hotel yang masih be-

● ke halaman 15

Kapolresta Terkejut

● Sambungan Hal 9

lum menyalurkan pajak yang telah dibayarkannya.

"Saya juga sebagai wajib pajak. Berarti uang saya belum disetorkan ke pemerintah. Wah uang saya dgelapkan," katanya yang kemudian diiringi gelak tawa peserta Sosialisasi Kepada Wajib Pajak Daerah di Kota Yogyakarta tentang Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah melalui program moni-

toring secara online, Ruang Bima Balaikota, Pemkot Yogyakarta, Rabu (7/8).

Ia mengingatkan para pelaku usaha yang hadir dalam kesempatan tersebut bahwa upaya penegakan hukum menjadi jurus pamungkas alias ditempatkan di bagian terakhir.

"Penegakan hukum treatment dengan memaksa kewajiban wajib pajak untuk ditunaikan. Pendekatan persuasif semacam ini saya nilai bagus untuk membuka nasionalisme kita," beber-

nya.

Ia pun meminta agar semua pelaku usaha di Yogyakarta ikut membantu bangsa, negara, dan Pemda dengan menyetorkan uang yang telah dipungut dari wajib pajak.

"Karena kalau ini tidak dilakukan, penjeratan hukum akan dilakukan. Selama ini kita lihat KPK dengan penegakan hukumnya. Ada saja yang sudah ditangkap, diborgol, dipenjar. Hari ini kita lihat sisi lain tugas KPK adalah tugas pencegahan," pungkasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Inspektorat			

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005